

BAB V  
KEHIDUPAN SOSIAL BUDAYA ETNIS TIONGHOA DI SIDOARJO PADA  
TAHUN 1999 – 2019

A. Kondisi Awal Pasca Tragedi Kemanusiaan Mei 1998

Jika melihat perjalanan orang – orang Tionghoa dari masa ke masa sebagai bagian dari kehidupan kebhineka tunggal ika-an Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengharuskan masyarakat untuk memahami secara menyeluruh mengenai sejarah dan peranan orang – orang Tionghoa. Melalui Pancasila dan Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia, negeri ini berusaha merangkul orang – orang Tionghoa sebagai bagian dari bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Namun hal ini tidak banyak disadari oleh masyarakat. Oleh karena itu, sentimen – sentimen terhadap orang – orang Tionghoa muncul, mengiringi perjalanan hidup orang – orang Tionghoa di Indonesia.

Tragedi Mei 1998 adalah peristiwa yang penting bagi orang – orang Tionghoa. Peristiwa tersebut menjadi ujung dari tindakan diskriminasi yang diberikan oleh pemerintahan Orde Baru. Setelah terjadinya tragedi Mei 1998, pasti ada perasaan takut dan berhati – hati yang dimiliki oleh orang – orang Tionghoa. Walaupun Sidoarjo tidak terdampak tragedi tersebut, sebagai sesama keturunan Etnis Tionghoa tentu ada perasaan senasib. Setelah era Orde Baru berakhir, ada orang – orang Tionghoa yang bersedia mengeluarkan curahan hatinya, namun tak sedikit juga yang memilih untuk tidak mengekspresikannya karena tidak mau

---

<sup>1</sup> Sinta Paramita, “Komunikasi Politik dan Demokrasi Etnis Tionghoa dalam Pemilu 2014” dalam *Proceeding Seminar Nasional Komunikasi Politik*, (Malang: Penerbit Intrans, 2014), hlm. 8.

membuka kenangan dimasa lalu. Salah satu upaya dari orang – orang Tionghoa di Sidoarjo tak lain adalah terus menjaga hubungan baik dengan masyarakat disekitarnya yang sudah terjalin sejak lama.

Runtuhnya kepemimpinan rezim Orde Baru telah mengembalikan penggunaan istilah “Tionghoa” sebagai sebutan untuk orang – orang Tionghoa. Istilah “Cina” atau “Cino” mulai ditanggalkan. Presiden B.J. Habibie yang meneruskan kepemimpinan dari Soeharto juga menggunakan istilah “Tionghoa”. Padahal B.J. Habibie selama menjabat sebagai Wakil Presiden di era kepemimpinan Soeharto sering dianggap sebagai orang yang anti-Tionghoa.<sup>2</sup> B.J. Habibie dirasa kurang simpatik terhadap etnik Tionghoa. Contohnya dalam aspek ekonomi. Beliau mengecam orang Tionghoa menguasai ekonomi Indonesia. Kecaman ini dilontarkan ketika B. J. Habibie ketika masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.<sup>3</sup> Selain itu para aktivis Orde Baru yang sadar akan makna “Cina” sebagai panggilan orang Tionghoa juga berangsur – angsur mulai meninggalkan istilah “Cina” sebagai sapaan orang Tionghoa.<sup>4</sup>

Runtuhnya Orde Baru juga masih menyisahkan beban – beban kehidupan masa lalu bagi orang – orang Tionghoa. Beban tersebut masih memberatkan keadaan sebagian besar masyarakat Tionghoa di Indonesia. Secara ideologis orang – orang Tionghoa masih dikatakan sebagai “orang tanpa sejarah”. Padahal

---

<sup>2</sup> Leo Suryadinata, “Apakah Istilah “Cina” Harus Dipertahankan?” dalam *Etnis Tionghoa dan Nasionalisme Indonesia: Sebuah Bunga Rampai 1965 – 2008*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 195.

<sup>3</sup> Leo Suryadinata, “Negara dan Minoritas Tionghoa di Indonesia” dalam *Jurnal Wacana Vol. 1 No.2*, Oktober 1999, hlm. 244.

<sup>4</sup> Leo Suryadinata, “Apakah Istilah “Cina” Harus Dipertahankan?” dalam *op cit*, hlm. 195.

sepanjang perjalanan bangsa ini mereka sudah menjadi bagian dari struktur lapisan masyarakat.<sup>5</sup>

Era Reformasi muncul setelah Orde Baru tenggelam. Reformasi hukum menjadi salah satu agenda reformasi yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia, tak terkecuali orang – orang Tionghoa.<sup>6</sup> Sentimen anti-Tionghoa diharapkan dapat terkikis karena adanya reformasi hukum yang tidak lagi membatasi kebudayaan suatu golongan. Batasan – batasan kehidupan umat Konghucu pada pemerintahan Soeharto telah berakhir, setelah Presiden B.J. Habibie memutuskan untuk menghapus istilah pribumi dan non – pribumi.<sup>7</sup> Keputusan tersebut tertuang pada Inpres No. 26 Tahun 1998. Seluruh aparatur pemerintahan dilarang menggunakan istilah pribumi dan non- pribumi untuk membedakan warga Tionghoa dan warga negara Indonesia pada umumnya.<sup>8</sup> Penghapusan istilah pribumi dan non – pribumi ini setidaknya bisa menjadi tanda bahwa sesungguhnya orang – orang Tionghoa merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lewat kebijakan dari Presiden B.J. Habibie ini, diharapkan bisa menjadi awal perdamaian antara kaum yang disebut mayoritas dengan kaum yang disebut minoritas.

---

<sup>5</sup> Charles A. Coppel, “Kendala – kendala Sejarah dalam Penerimaan Etnis Cina di Indonesia yang Multikultural” dalam Jurnal *Antropologi Indonesia*, Vol. 71, 2003, hlm.20.

<sup>6</sup> Mochamad Iqbal Jatmiko, “Hibridasi Masyarakat Tionghoa di Kecamatan Lasem Pasca – Reformasi” dalam Jurnal *Umbara* Vol. 4 No. 2, Desember 2019, hlm. 102.

<sup>7</sup> Budilistijo Suboko, “Sejarah Tahun Baru Imlek” dalam *Radar Surabaya* Edisi Sabtu, 1 Februari 2014.

<sup>8</sup> Nur Hidayah, Retno Winarni, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa di Bidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi pada Tahun 1998 – 2012” dalam Jurnal *Publik Budaya* Vol. 2 No. 2, Juli 2014, hlm. 27.

Iklm demokratis yang berkembang di Indonesia setelah orde baru juga direspon positif oleh oleh kelompok muslim Tionghoa. Iklm demokratis atau iklim kebebasan digunakan oleh kalangan muslim Tionghoa untuk merumuskan orientasi gerakan yang lebih terstruktur. Kalangan muslim Tionghoa berusaha meleburkan diri dengan masyarakat pribumi.<sup>9</sup> Iklm demokrasi di Indonesia pasca-Orde Baru telah memberikan kebebasan bagi orang – orang Tionghoa untuk menunjukkan identitas budaya mereka. Pandangan – pandangan mereka tentang kehidupan beragama lebih terbuka.<sup>10</sup>

Setelah tahun 1999, pembelajaran Bahasa Mandarin mengalami kemajuan pesat. Beberapa lembaga pendidikan mulai mengajukan izin untuk menyelenggarakan pendidikan Bahasa Mandarin. Perkembangan *trend* Bahasa Mandarin di Masyarakat belum bisa dikatakan bahwa pendidikan Tionghoa kembali lagi. Pendidikan Bahasa Mandarin setelah masa Orde Baru lebih banyak dilakukan di tempat kursus – kursus Bahasa Mandarin.<sup>11</sup>

Kemajuan Bahasa Mandarin pasca-Orde Baru bukan karena dorongan untuk mengembalikan kebudayaan, namun lebih karena faktor permintaan pasar yang tinggi. Bursa kerja mulai mencari pegawai yang memiliki kecakapan berbahasa Mandarin. Hal ini mengikuti kemunculan Tiongkok sebagai negara dengan perindustrian yang berkembang. Sadar akan pentingnya Bahasa Mandarin,

---

<sup>9</sup> Rabith Jihan Amaruli, Mahendra Pudji Utama, “Konversi Agama dan Formasi Identitas: Tionghoa Muslim Kudus Pasca – Orde Baru” dalam Jurnal *Humanika* Vol. 22 No. 2, 2015, hlm. 107.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 110.

<sup>11</sup> Chang Yau Hoon, *Identitas Tionghoa: Pasca Suharto – Budaya, Politik, dan Media –*, (Jakarta : Penerbit LP3ES, 2012), hlm. 77 – 79.

pemerintah mendirikan Badan Koordinasi Penyelenggaraan Pendidikan Bahasa Mandarin. Hal ini bertujuan untuk memajukan pengajaran Bahasa Mandarin di Indonesia.<sup>12</sup> Lembaga kursus Bahasa Mandarin dan sekolah swasta yang mengklaim bahwa mereka memakai kurikulum internasional dengan beberapa bahasa asing mulai banyak bermunculan ketika masa Reformasi.

#### B. Kembalinya Gempita Perayaan Tahun Baru Imlek

Perayaan tahun baru Imlek merupakan sesuatu yang terlarang untuk ditampilkan didepan umum pada masa Orde Baru. Lewat Inpres 14/1967 secara tegas larangan tersebut diberlakukan. Selama 32 tahun orang – orang Tionghoa berada dalam dilema. Mereka lahir di Indonesia namun kebudayaannya tidak diterima sebagai budaya Indonesia. Sampai akhirnya ada sebuah harapan ketika pemerintahan berganti.

Pada pemerintahan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) Inpres 14/ 1967 dicabut dengan Keppres No. 6/ 2000 tertanggal 17 Januari 2000. Dengan demikian orang – orang Tionghoa diperbolehkan merayakan tahun baru Imlek secara terbuka, diperbolehkan kembali menggunakan bahasa Mandarin, tidak ada pengingkaran hak- hak sipil umat agama Khonghucu, dan diperbolehkan pengajaran agama Khonghucu.<sup>13</sup> Faktor yang melatar belakangi keputusan Presiden Adurrahman Wahid menghapus kebijakan diskriminatif yang dikeluarkan oleh rezim Orde Baru ada dua. Pertama adalah latar belakang sosok Presiden Abdurrahman Wachid yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 81.

<sup>13</sup> Budilistijo Suboko, *loc cit*.

sosio-kultural. Kedua adalah dorongan untuk memperbaiki kondisi sosial budaya Etnis Tionghoa di Indonesia pada tahun 1949 – 1998.<sup>14</sup>

Selain itu, pada tanggal 9 April 2001, Presiden Adurrahman Wahid juga mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 19/2001 yang menjadikan Imlek sebagai hari libur fakultatif (hanya berlaku untuk mereka yang merayakan).<sup>15</sup> Keputusan penting ini menjadi tonggak awal kembalinya kemeriahan suasana tahun baru Imlek bagi orang – orang Tionghoa. Ditetapkannya Imlek sebagai hari libur fakultatif membuat orang – orang Tionghoa dapat menikmati perayaan tahun baru Imlek bersama keluarga tanpa harus meninggalkan pekerjaan atau sekolah. Dengan kebijakan tersebut mereka juga bisa lebih menikmati prosesi sembahyang di Kelenteng dengan khidmat.

Orang – orang Tionghoa kini tidak perlu lagi merasa ketakutan ketika ingin merayakan hari raya agama Konghucu. Bukti bahwa agama Konghucu dan kebudayaan Tionghoa sudah diterima masyarakat luas adalah dapat dengan mudah ditemukannya ucapan “Gong Xi Fa Cai” dalam tulisan latin. Ucapan tersebut merupakan ungkapan “Selamat Tahun Baru Imlek” yang ditujukan untuk orang – orang Tionghoa.<sup>16</sup> Hal – hal bernuansa Tionghoa juga mudah ditemui ketika tahun

---

<sup>14</sup> Siska Yulia Nurda, Sugiyanto, Marjono, “Peranan KH. Abdurrahman Wahid dalam Penghapusan Diskriminasi terhadap Etnis Tionghoa di Indonesia” dalam *Jurnal Artikel Ilmiah Mahasiswa* Vol. 1 No.1, 2014, hlm. 3.

<sup>15</sup> Hasyim Hasanah, “Perayaan Imlek Etnis Tionghoa: Menakar Kembali Implikasi Psiko – Sosiologis Perayaan Imlek bagi Komunitas Muslim di Lasem Palembang” dalam *Jurnal Penelitian* Vol. 8 No. 1, Februari 2014, hlm. 6.

<sup>16</sup> Litbang Kompas, *Gus Dur Bapak Warga Tionghoa*, (Jakarta: Kompas, 2020) hlm. 33.

baru imlek seperti baju merah khas Tionghoa dan pernak – pernik bertuliskan Bahasa Mandarin.

Tidak bisa dipungkiri bahwa tahun baru Imlek telah menjadi sebuah bagian dari kehidupan dari sebagian masyarakat Indonesia. Perayaan tahun baru Imlek pada masa Reformasi bukan hanya milik orang – orang Tionghoa, namun juga menjadi sarana hiburan bagi orang – orang Indonesia pada umumnya.<sup>17</sup> Orang – orang Tionghoa berbaur dengan orang Jawa di Sidoarjo dalam merayakan tahun baru Imlek. Sesuatu yang jarang atau bahkan susah untuk ditemui selama masa Orde Baru.

Kebijakan Presiden Adurrahman Wahid tidak hanya telah mengembalikan gairah perayaan tahun baru Imlek, kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Adurrahman Wahid ini juga telah mengembalikan eksistensi dari agama Konghucu sebagai ajaran leluhur orang – orang keturunan Tionghoa. Sejak Inpres Inpres 14/ 1967 dicabut, orang – orang Tionghoa lebih leluasa untuk mengekspresikan kebudayaannya. Mereka tidak lagi dalam penjagaan yang sangat ketat ketika merayakan HUT Dewi Mak Co yang menjadi tuan rumah di Kelenteng Tjong Hok Kiong. Pada masa reformasi perayaan hari besar yang diperingati oleh umat Tri

---

<sup>17</sup> *Ibid*, 41



Dharma di Kelenteng Tjong Hok Kiong diperingati sesuai dengan kehendak mereka tanpa ada batasan yang diberikan oleh pemerintah.



Gambar 5.1: Pentas seni dalam rangka perayaan HUT Dewi Mak Co di Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo pada tahun 2000.

Sumber: Album Foto Kelenteng Tjong Hok Kiong.



Gambar 5.2: Pentas seni dalam rangka perayaan HUT Dewi Mak Co di Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo pada tahun 2019.

Sumber: Album Foto Kelenteng Tjong Hok Kiong



Pada masa pemerintahan Presiden Megawati, tahun baru Imlek dinyatakan sebagai hari libur nasional. Hal tersebut dinyatakan Presiden Megawati pada tanggal 17 Februari 2002 di Jakarta saat beliau memberikan amanat ketika perayaan tahun baru Imlek (Cap Go Meh) 2553.<sup>18</sup> Sejak ditetapkannya tahun baru Imlek sebagai hari libur nasional, disetiap penyelenggaraan festival memperingati tahun baru Imlek lokasi selalu ramai oleh pengunjung. Perayaan tahun baru Imlek bukan hanya dirayakan oleh orang – orang Tionghoa, namun juga orang – orang pribumi. Hal tersebut dapat menjadi sarana untuk menaikkan eksistensi dari kebudayaan Etnis Tionghoa.

Walaupun baru pada masa pemerintahan Megawati tahun baru Imlek menjadi hari libur nasional, namun sesungguhnya segala kebebasan yang didapatkan oleh orang – orang Tionghoa adalah atas dasar pemikiran Abdurrahman Wachid. Melalui prinsip multikulturalisme yang ditanamkan oleh pemerintahan Gus Dur, orang – orang Tionghoa sudah tidak merasa didiskriminasi lagi dalam hidup beragama dan berbudaya. Bahkan ketika Gus Dur wafat, beliau tetap dikenang warga Tionghoa meski kini telah tiada, bahkan disebut- sebut sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. Setiap perayaan tahun baru Imlek atau Cap Go Meh, warga Tionghoa selalu mengenang jasa almarhum.<sup>19</sup>

Atas jasa – jasa Gus Dur, kesenian orang – orang Tionghoa seperti Wayang Potehi dan Barongsai mulai tampil didepan umum. Ini menjadi salah satu kabar bagus, karena pada zaman Orde Baru kesenian ini terancam kepunahan karena tidak

---

<sup>18</sup> Budilistijo Suboko, *loc cit.*

<sup>19</sup> Avit Hidayat, “Gus Dur Jadi Bapak: Selalu Utamakan Kemanusiaan.” dalam *Radar Surabaya* Edisi Sabtu, 2 Maret 2013.

ada generasi penerus yang belajar memaiknya. Tidak adanya kebebasan yang diberikan selama Orde Baru, membuat pengajaran seni dan budaya khas Tionghoa seakan terputus. Dengan kebebasan dimasa reformasi ini membuat seni budaya Etnis Tionghoa di Indonesia terus lestari.

### C. Kehidupan Sosial Etnis Tionghoa pada Masa Reformasi

Setelah Orde Baru, muncul organisasi – organisasi sosial yang berbasis Etnis Tionghoa. Organisasi pertama adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI). Setelah organisasi tersebut pecah, muncul lagi organisasi baru yang bernama Perhimpunan Keturunan Tionghoa Indonesia (INTI). Organisasi – organisasi ini dibentuk sebagai salah satu upaya untuk menghapus diskriminasi rasial terhadap orang – orang Tionghoa di Indonesia.<sup>20</sup> Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul mengembangkan aspirasi dan pikiran sesuai dengan keyakinan masing – masing mulai didapatkan oleh orang – orang Tionghoa.

Selain itu juga terdapat beberapa komunitas peranakan seputar budaya yang berkembang di Indonesia. Meskipun pemerintah terus berupaya untuk menghilangkan diskriminasi pada masyarakat Tionghoa, namun *stereotype* seperti jika masyarakat Tionghoa itu pelit, dan tidak memiliki jiwa nasionalisme masih berkembang pada warga pribumi. Budi Santoso mendirikan Komunitas Peranakan Nusantara. Budi Santoso terus menerus berusaha meluruskan persepsi masyarakat tentang warga Tionghoa. Selain itu Budi Santoso juga membuat berbagai tulisan

---

<sup>20</sup> Leo Suryadinata, “Kebijakan Negara Indonesia terhadap Etnis Tionghoa” dalam *op cit*, hlm. 222.

sejarah dan budaya hasil asimilasi Tionghoa dengan pribumi seperti lontong cap go meh, kue mangkok, kacang kuwa dan lain sebagainya, sebagai budaya kuliner khas Tionghoa. Ada Tari Lili, Tari Payung dan Tari Kipas yang merupakan produk asimilasi budaya Tionghoa.<sup>21</sup>

Organisasi – organisasi yang didirikan oleh Etnis Tionghoa pada masa Reformasi tak lain adalah sebagai sarana untuk menyuarakan semangat anti-diskriminasi. Selain itu, organisasi – organisasi berbasis Tionghoa tersebut juga sebagai bentuk upaya untuk menghilangkan *stereotype* negatif tentang orang – orang Tionghoa di masyarakat Pribumi. Di era Reformasi semangat anti-diskriminasi terus didengungkan, baik oleh orang Tionghoa sendiri maupun pemerintah. Hal tersebut bertujuan agar pengalaman kelam pada masa lalu tidak terulang.

Pada masa Reformasi, pemerintah sangat mendukung upaya – upaya penghapusan diskriminasi. Hal tersebut ditandai dengan munculnya sejumlah kebijakan untuk mencabut kebijakan diskriminatif ketika masa Orde Baru. Kebijakan – kebijakan pemerintah tersebut juga bertujuan untuk memberikan perubahan kepada orang – orang Tionghoa. Kebijakan – kebijakan pemerintah tersebut merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Konferensi Perjuangan Anti

---

<sup>21</sup> Umy Hany Akasah, “Budi Santoso, Founder Komunitas Peranakan Nusantara: Ubah Stereotipe Tionghoa dengan Pendekatan Budaya” dalam *Radar Surabaya* Edisi Jum’at, 30 Agustus 2013.

Diskriminasi Etnis dan Ras di Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 12 September 1999 di Mojokerto.<sup>22</sup>

Ketika Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, semangat anti-diskriminasi tetap dipegang teguh oleh pemerintah. Pada tahun 2006, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan UU No. 12/2006 tentang kewarganegaraan Indonesia. UU No. 12/2006 ini mempertegas Inpres No. 26 Tahun 1998 yang pernah dikeluarkan oleh B.J. Habibie, bahwa di Indonesia sudah tidak ada lagi istilah pribumi dan non – pribumi, yang ada hanyalah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.<sup>23</sup> Kebijakan terhadap Etnis Tionghoa yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono untuk pertama kalinya ini semakin memperkuat pengakuan terhadap keberadaan orang – orang Tionghoa sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kebijakan kedua adalah UU No. 23/2006 tentang pendaftaran penduduk. Undang – undang ini mempermudah proses memperoleh Kartu Tanda Penduduk Indonesia bagi orang Tionghoa. Dimana pada masa Orde Baru orang – orang Tionghoa mengalami kesulitan untuk mengurus surat – surat yang menyatakan bahwa mereka adalah Warga Negara Indonesia. Kebijakan ketiga adalah UU No. 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (PDRE). Undang – undang yang dikeluarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini telah menyerap

---

<sup>22</sup> Leovandita Eka Jati, “Undang – Undang Anti Diskriminasi Tionghoa di Indonesia pada Tahun 1998 – 2008” dalam *Jurnal Avatara* Vol. 1 No. 2, Mei 2013, hlm. 113.

<sup>23</sup> Nur Hidayah, Retno Winarni, “Pengaruh Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Kehidupan Etnis Tionghoa dibidang Politik, Sosial, Budaya, dan Ekonomi di Kabupaten Jember dari Zaman Orde Lama Sampai Zaman Reformasi pada Tahun 1998 – 2012” dalam *Jurnal Publika Budaya* Vol. 2 No. 2, Juli 2014, hlm. 27.

prinsip – prinsip demokrasi. Undang – undang tersebut secara tegas menyebutkan bahwa orang Indonesia asli adalah orang – orang yang lahir di Indonesia dan tidak pernah pindah kewarganegaraan atas keinginan sendiri.<sup>24</sup>

Semangat anti-diskriminasi hampir rutin disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada perayaan Imlek 2558 (2007 Masehi) Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyerukan “sudah bukan saatnya lagi ada diskriminasi. Sudah bukan saatnya lagi saling mencurigai, membeda- bedakan orang berdasarkan etnis dan keyakinan yang dianut”. Pesan tersebut diulang lagi pada perayaan imlek 2559 (2008 Masehi), beliau menyampaikan “jangan lagi ada diskriminasi”.<sup>25</sup> Semangat anti-diskriminasi ini diharapkan juga dapat menular kepada seluruh masyarakat Indonesia.

Pencarian identitas diri pada kalangan orang – orang Tionghoa telah mengalami dinamika tersendiri. Jika dibandingkan dengan orang – orang Tionghoa diluar negara – negara Asia Tenggara lainnya, orang – orang Tionghoa di Indonesia membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa berbaur kedalam struktur masyarakat.<sup>26</sup> Namun seiring berjalannya waktu, orang – orang Tionghoa akhirnya dapat berbaur secara alami dengan orang – orang Pribumi. Di Kawasan Pecinan Sidoarjo, letak Kelenteng Tjong Hok Kiong yang beralamat di Jl. Hang Tuah, Desa Sidoklumpuk berada ditengah – tengah pemukiman masyarakat yang mayoritas muslim. Selain itu Kelenteng Tjong Hok Kiong juga berdekatan dengan sebuah

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> Akhmad Muzakki, “Imlek, Tionghoa, dan Politik” dalam *Jawa Pos* Edisi Rabu, 29 Januari 2014.

<sup>26</sup> Fitri Eriyanti, “Dinamika Posisi Identitas Tionghoa dalam Tinjauan Teori Identitas Sosial” dalam *Jurnal Demokrasi* Vol. 5 No. 1, 2006, hlm. 23.

Pondok Pesantren. Pondok Pesantren yang dimaksud adalah Pondok Pesantren Sabilurrosyad.

Meski berada di tengah – tengah lingkungan muslim, kehidupan sosial orang – orang Tionghoa di Sidoarjo sangat harmonis. Kerukunan antar umat beragama terjalin begitu erat. Budaya khas ketimuran yang mengenal rasa sungkan dan saling bersikap ramah diterapkan dengan baik. Pemikiran negatif tentang etnis Tionghoa yang sering digembor – gemborkan dapat disingkirkan dengan pendekatan sosial. Komunikasi sosial yang terus dibangun dari generasi ke generasi membuat orang – orang Tionghoa diterima sebagai bagian masyarakat. Orang – orang lokal yang sudah mengenal dekat keturunan Etnis Tionghoa yang berada di sekitarnya tidak akan mudah terprovokasi isu – isu rasial.<sup>27</sup>

Usaha – usaha Etnis Tionghoa dalam menjaga hubungan baik dengan orang – orang Pribumi terus dilakukan. Sosialisasi secara intens terus dijalankan agar orang – orang Pribumi disekitarnya mengenal mereka lebih dekat. Sosialisasi yang dilakukan bukan hanya sebatas percakapan dua arah. Namun juga penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sekitar. Rasa kepedulian sosial terhadap sesama manusia selalu ditanamkan dalam diri orang – orang Tionghoa. Selain karena hal tersebut sudah merupakan kewajiban mereka sebagai manusia dan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sikap peduli terhadap sesama ini akan mengikis persepsi negatif bahwa orang – orang Tionghoa tidak peduli dengan orang – orang Pribumi dan lebih mementingkan kepentingan golongan mereka.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.





Gambar 5.3: kegiatan pembagian sembako yang dilaksanakan oleh pengurus Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo pada tahun 2012

Sumber: Album Foto Kelenteng Tjong Hok Kiong

Selain dengan masyarakat umum, orang – orang Tionghoa juga berupaya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah. Kelenteng Tjong Hok Kiong yang disebut sebagai simbol eksistensi Komunitas Tionghoa di Kabupaten Sidoarjo terus menjaga hubungan baik dengan pemerintah selama bertahun – tahun. Ketika pihak Kelenteng hendak mengadakan kegiatan baik itu bersifat sosial maupun bersifat keagamaan seperti festival menyambut tahun baru Imlek atau HUT Dewi Mak Co, mereka selalu berkomunikasi dan melapor ke pemerintah daerah. Selama era reformasi pemerintah bersifat terbuka terhadap eksistensi kebudayaan Tionghoa di Kelenteng Tjong Hok Kiong.<sup>28</sup>

Selain gerakan dari orang – orang Tionghoa sendiri, pemerintah juga memiliki langkah untuk menjaga kerukunan umat beragama di Kabupaten Sidoarjo. Salah satu upaya adalah dengan membentuk sebuah forum yang dinamakan Forum

---

<sup>28</sup> Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.

Kerukunan Umat Beragama (FKUB). FKUB Kabupaten Sidoarjo bertempat di kantor Bangkesbangpol Kabupaten Sidoarjo yang terletak di Jl. Ahmad Yani, Sidoarjo. FKUB menjadi wadah komunikasi antar golongan, antar umat beragama, antar etnis di Kabupaten Sidoarjo.

Kepekaan orang – orang Tionghoa terhadap masalah identitas yang dialami oleh etnis mereka umumnya lebih banyak dimiliki oleh generasi tua. Generasi tua ini umumnya lebih aktif dalam setiap kegiatan kebudayaan Tionghoa. Hal ini berbeda jauh dari pemuda – pemuda Tionghoa. Kepekaan generasi tua Tionghoa ini juga terlihat dari respon mereka ketika masih ada orang – orang yang dahulu disebut sebagai pribumi masih menggunakan istilah “Cina” atau dalam Bahasa Jawa “Cino” sebagai sapaan bagi orang – orang Tionghoa.<sup>29</sup>

Sebutan “Cina” atau dalam Bahasa Jawa menggunakan istilah “Cino” sangat menyakitkan bagi orang – orang Tionghoa terlebih bagi generasi yang pernah hidup di era Orde Baru. Bagi orang – orang Tionghoa, istilah “Cina” atau “Cino” sebagai sapaan bagi orang – orang Tionghoa masih dianggap sebagai sebuah penghinaan. Oleh karena itu orang – orang Tionghoa (khususnya generasi tua) lebih senang dipanggil “Tionghoa” daripada “Cina”. Hal ini dikarenakan generasi muda Tionghoa belum mengalami pengalaman pahit yang dialami oleh orang tua, kakek dan neneknya. Bagi generasi muda Tionghoa, sapaan “Cina” ataupun “Tionghoa” tidak ada bedanya.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Symphony Akelba Christian, “Identitas Budaya Orang Tionghoa Indonesia” dalam *Jurnal Cakrawala Mandarin* Vol. 1 No.1, April 2017, hlm.19.

<sup>30</sup> Aimee Dawis, *Orang Indonesia Tionghoa mencari Identitas*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 81.

Oleh karena itu, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang kedua, beliau membuat keputusan untuk mengganti istilah China menjadi Tionghoa atau Tiongkok. Keputusan tersebut tertuang dalam Keppres No.12/2014. Istilah Cina, dianggap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dapat menimbulkan dampak psikososial- diskriminatif dalam hubungan sosial masyarakat Indonesia dengan masyarakat Tionghoa. Menurut beliau memperlakukan seseorang atau sekelompok orang dengan cara diskriminasi berarti melanggar nilai, prinsip dan perlindungan hak asasi manusia. Setiap warga negara berhak mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada yang membeda – bedakan.<sup>31</sup>

Pada masa Reformasi ini orang – orang Tionghoa ternyata belum sepenuhnya lepas dari diskriminasi. Masih ada peraturan peninggalan Orde Baru yang belum diselesaikan. Keputusan Presidium Kabinet nomor 127/U/Kep/12/1966 tentang penggantian nama orang – orang Tionghoa dengan nama yang bernuansa lebih keindonesiaan. Belum dicabutnya Kepres tersebut masih membuat orang – orang Tionghoa menamakan anak – anaknya dengan nama Tionghoa.<sup>32</sup> Oleh karena itu pada masa reformasi banyak anak – anak muda keturunan Tionghoa namun masih memakai nama keidonesiaan.

Anak – anak muda keturunan Tionghoa secara umum adalah generasi yang sudah tidak begitu mengenal kebudayaan – kebudayaan Tionghoa secara mendalam. Mereka adalah generasi yang digambarkan sebagai orang Tionghoa

---

<sup>31</sup> Oktasari, “Perubahan Kebijakan Kerjasama Indonesia Tiongkok pada Pemerintahan Jokowi 2014 – 2015” dalam *Jurnal Jom Fisip* Vol. 3 No.1, Februari 2016, hlm 2 - 3

<sup>32</sup> Litbang Kompas, *op cit*, hlm. 35.

yang tidak memiliki kecakapan dalam berbahasa Mandarin secara fasih.<sup>33</sup> Kondisi tersebut merupakan salah satu dampak kebijakan – kebijakan yang membatasi kebudayaan orang – orang Tionghoa. Pengajaran budaya antar generasi menjadi terhambat.

#### D. Penguatan Eksistensi Kebudayaan Tionghoa Melalui Renovasi Kelenteng Tjong Hok Kiong

Pada tahun 2003, Pemerintah menetapkan Kelenteng Tjong Hok Kiong sebagai salah satu cagar budaya. Penetapan ini menunjukkan sebuah pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan Kelenteng ini. Hingga tahun 2017, Kelenteng Tjong Hok Kiong sering mengalami banjir. Gedung induk yang menjadi tempat peribadatan umat sering terendam air. Banjir tersebut sering terjadi terlebih ketika musim hujan yang biasanya bertepatan dengan tahun baru Imlek. Kondisi tersebut jelas mengganggu prosesi perayaan tahun baru Imlek sendiri. Situasi banjir ketika beribadah terus dialami oleh orang – orang Tionghoa selama bertahun – tahun. Permasalahan tersebut seakan luput dari pengawasan pemerintah.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Yosafat Hermawan Trinugraha, “Politik Identitas Anak Muda Minoritas: Ekspresi Identitas Anak Muda Tionghoa melalui Dua Organisasi Anak Muda Tionghoa di Surakarta Pasca Orde Baru” dalam *Jurnal Studi Pemuda* Vol. 2 No.2, September 2013, hlm. 177.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Jaikun (49 Tahun), Petugas Harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo Sejak Tahun 1993, Sidoarjo, 28 Juli 2020.

Atas inisiatif dari jajaran pengurus Kelenteng Tjong Hok Kiong pada tahun 2017, Kelenteng mulai direnovasi. Renovasi ini berjalan sekitar delapan belas bulan. Dalam prosesnya, pengurus Kelenteng Tjong Hok Kiong banyak belajar dari Kelenteng – Kelenteng di Malang, Surabaya, hingga Semarang yang sudah berpengalaman dalam melakukan renovasi atau pemugaran bangunan Kelenteng. Hal tersebut dikarenakan dalam merenovasi sebuah Kelenteng tidak sama halnya seperti merenovasi rumah. Banyak ornamen yang harus diperhatikan. Ornamen – ornamen yang ada di Kelenteng menggambarkan Dewa – Dewi yang ada di dalam Kelenteng.<sup>35</sup>



Gambar 5.4: Ornamen Chung i yang memiliki makna kesetiaan kawan dan kesetiaan negara yang menggambarkan sifat dari Dewa – Dewi yang ada di dalam ruangan tersebut.

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis.

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.

Renovasi ini melibatkan beberapa kontraktor yang berkompeten. Pihak yang dilibatkan adalah para ahli rekonstruksi ornamen, teknisi sipil dan para ahli ukir. Karena tingkat kerumitan tersebut maka renovasi Kelenteng ini tidak diserahkan pada satu kontraktor. Kayu yang digunakan sebagai ukiran didatangkan dari Semarang. Ukiran – ukiran yang kini menjadi interior merupakan salah satu hasil renovasi pada tahun 2017.<sup>36</sup>

Sumber pendanaan renovasi Kelenteng Tjong Hok Kiong ini berasal dari sumbangan sumbangan dari donatur. Selain itu untuk perawatan rutin atau secara berkala semua aset dan properti yang ada di Kelenteng Tjong Hok Kiong juga berasal dari sumbangan/kas para jama'ah yang bersembahyang di Kelenteng Tjong Hok Kiong. Selain itu sumber dana juga berasal dari donatur dan swadaya pengurus. Sama halnya dengan tempat peribadatan yang lain.<sup>37</sup>

Setelah renovasi Kelenteng Tjong Hok Kiong memiliki gedung yang lebih tinggi dari permukaan jalan. Dengan bertambah tingginya area gedung induk Kelenteng Tjong Hok Kiong, ketika musim hujan air sudah tidak masuk kedalam gedung lagi. Peribadatan umat tetap berjalan lebih baik walaupun musim hujan. Renovasi tersebut juga berkat dukungan swadaya dari para umat Tri Dharma yang beribadah di Kelenteng. Renovasi Kelenteng Tjong Hok Kiong baru selesai pada tahun 2019.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Wawancara dengan Bapak Willy (52 Tahun), Wakil Ketua Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo, Sidoarjo, 4 Agustus 2020.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Bapak Jaikun (49 Tahun), Petugas Harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo Sejak Tahun 1993, Sidoarjo, 28 Juli 2020.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Bapak Jaikun (49 Tahun), Petugas Harian Kelenteng Tjong Hok Kiong Sidoarjo Sejak Tahun 1993, Sidoarjo, 28 Juli 2020.



Kelenteng Tjong Hok Kiong diresmikan kembali pada tanggal 19 Februari 2019. Bertempat di Kelenteng Tjong Hok Kiong, peresmian dihadiri langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Saiful Ilah. Secara simbolis beliau menandatangani prasasti yang kemudian diletakkan pada dinding gedung induk sebelah timur Kelenteng Tjong Hok Kiong. Dengan selesainya renovasi Kelenteng diharapkan umat Tri Dharma yang sehari – hari beribadah dapat merasa lebih nyaman daripada sebelum – sebelumnya.



Gambar 5.5: Peresmian hasil renovasi Kelenteng Tjong Hok Kiong oleh Bupati Sidoarjo.

Sumber: <http://portal.sidoarjokab.go.id/resmikan-klenteng-tjong-hok-kiong-bupati-bersyukur-kerukunan-umat-beragama-di-sidoarjo-terjaga-dengan-baik> diakses pada 1 Agustus 2020



Gambar 5.6: Prasasti yang ditanda tangani Bupati Sidoarjo pada peresmian Kelenteng Tjong Hok Kiong.

Sumber: Dokumentasi Pribadi Penulis.

